

2022



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan Tahun 2022 dengan sistematika yang ditentukan.

Kami berharap LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tarakan. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Tarakan, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Tarakan



Doni Prabudi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Tarakan dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang disampaikan kepada *stakeholder* melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Tarakan tahun 2022. Laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN, yaitu

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Kekayaan Negara adalah KPKNL Tarakan sebagai lembaga/institusi vertikal DJKN di daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang di lingkup wilayah kerja Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Profesional adalah melaksanakan pelayanan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah memberikan pelayanan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Tarakan untuk periode 2020 s.d. 2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Tarakan yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Tarakan telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
7. Edukasi yang Efektif
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
9. SDM yang Kompeten
10. Organisasi yang Fit For Purpose
11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang Optimal

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Tarakan. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tarakan Tahun 2022, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU yang merupakan Kontrak Kinerja DJKN Tahun 2022, yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal 2022	Target Addendum 2022	Realisasi 2022 (Raw)	Realisasi 2022 (%)
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	7.362.000.000	-	10.930.549.214	148,47%
	Persentase produktivitas lelang	34%	-	-	55,60%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan	Persentase Realisasi Pokok Lelang	91.000.000.000	-	143.870.208.666	158,10%

Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	114.000.000	605.000.000	1.353.848.344	223,78%
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,50	-	4,80	-
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	-	-	78,55%
	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	-	20	200,00%
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	-	22	122,22%
	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	-	219	100,00%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	-	-	0,00%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	-	-	100,00%
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	-	-	0,00%
Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92	-	95,57	-
Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	-	-	91,89%
SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	-	-	120,00%
Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85	-	97,83	115,09%
	Nilai review pengelolaan kinerja	80	-	96,42	120,53%

	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	-	97,63	108,48%
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	-	-	94,40%
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	-	-	160,97%

Untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2022, KPKNL Tarakan telah berhasil mencapai target atas 19 (sembilan belas) dari 20 (dua puluh) IKU dan memperoleh nilai kinerja organisasi dengan kategori hijau. Dan hanya terdapat 1 (satu) IKU yang kategori kuning yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Penyerapan Anggaran
- b. RPD
- c. Efisiensi Anggaran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. PENJELASAN UMUM	2
1. Profil Kantor	2
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi	3
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	5
C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) ORGANISASI	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis KPKNL Tarakan	8
B. Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan	13
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	19
A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI	19
1. Membandingkan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Periode Sebelumnya .23	
a. Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu Sampai Dengan Lima Tahun Terakhir	23
b. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah .27	
2. Upaya-upaya effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	29
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .. 31	
4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	35
6. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko	37
7. Rencana Aksi ke Depan	37
B. REALISASI ANGGARAN	40
1. Pendapatan KPKNL TARAkan	40
2. Belanja KPKNL TARAkan	40
BAB IV PENUTUP	41
A. SIMPULAN	41
B. LANGKAH DI MASA MENDATANG	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Profil Kantor

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jalan Halmahera No. 175, Pamusian Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Tarakan meliputi:

1. Kota Tarakan;
2. Kabupaten Bulungan;
3. Kabupaten Malinau;
4. Kabupaten Nunukan; dan
5. Kabupaten Tana Tidung.

KPKNL Tarakan dipimpin oleh Kepala Kantor Doni Prabudi, dibantu Kepala Subbagian Umum Nurtina Rahma Fahriza, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Chusaeri, Kepala Seksi Piutang Negara Pramud Ichsan Chusnun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Melliana Andriani Susanto, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Lapianus Bubu, serta Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda Joko Hadi Sugondo, Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama Arasmin Simamora, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama Yohanes Eko Dedi Kurniawan, Heni Rahayu Wulandari, dan Rini Rosfitasari. Dalam memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang, KPKNL Tarakan diperkuat dengan sumber daya manusia berjumlah 32 orang yang terdiri dari 22 orang ASN dan 10 orang PPNPN.

2. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

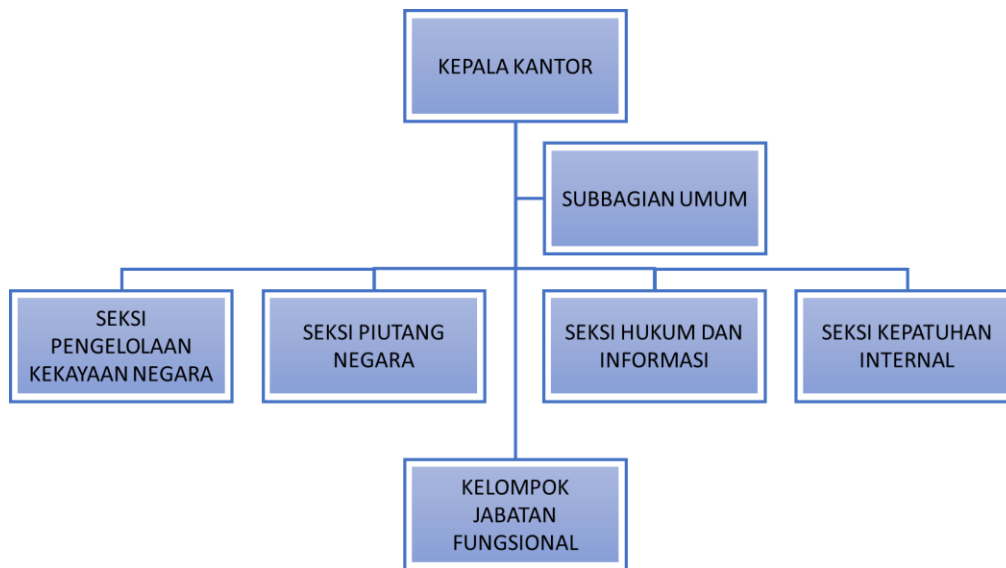
- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

- c. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. Penyimpanan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan Piutang Negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain;
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Tarakan terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, didukung oleh sumber daya manusia yang ada di KPKNL Tarakan tahun 2022 berjumlah 22 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	-	-	-
2	II	1	3	4
3	III	6	11	17
4	IV	1	-	1
	Jumlah	8	14	22

2. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai PNS	Pendidikan					Jumlah
		SLTA	DI	DIII	DIV/S-1	S2	
1.	Eselon 2	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon 3	-	-	-	-	1	1
3.	Eselon 4	-	-	-	2	3	5
4.	Fungsional	-	-	-	5	-	5
5.	Pelaksana	-	1	3	7	-	11
	Jumlah	-	1	3	13	5	22

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

KPKNL sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan Negara, pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang, KPKNL memiliki peran strategis berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Tarakan memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan Negara. Peningkatan daya guna dan hasil terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan Negara, pengamanan kekayaan Negara dan penatausahaan kekayaan Negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Tarakan mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Tarakan sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Tarakan dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain: Portofolio Aset, Sertifikasi BMN, serta persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara.

2. Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Penilaian dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan BMN lain yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan BMN, dan pengurusan piutang negara (penilaian barang jaminan). Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab lain yang sah.

Akan tetapi, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusan kepada PUPN melalui KPKNL, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap Piutang Negara yang telah diserahkan dan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Secara istilah, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului adanya Pengumuman Lelang. Selain itu, lelang merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah dilekatkan Hak Tanggungan dan eksekusi terhadap putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. KPKNL Tarakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat selalu mengutamakan pelaksanaan lelang yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan efisien. Diharapkan dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya terkait pengembangan *e-auction* dan *platform marketplace auction*, lelang dapat menjadi sarana transaksi pilihan masyarakat serta dapat berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan Pengurusan Piutang Negara, KPKNL Tarakan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Biaya Administrasi Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan senantiasa memberikan pelayanan yang prima, KPKNL Tarakan diharapkan dapat menghasilkan PNBP dan merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pengelolaan kekayaan negara. Sepanjang tahun 2022, KPKNL Tarakan telah berperan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada secara optimal.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Tarakan memiliki beberapa permasalahan yang terjadi di tahun 2022, yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara
 - Masih terdapat BMN dengan tingkat kesesuaian penggunaan dengan SBSK yang belum optimal;
 - Terdapat kendala dalam proses pensertipikatan tanah hibah yang membutuhkan waktu lebih lama;
 - Terdapat perbedaan kondisi BMN yang tercatat dengan kondisi di lapangan;
 - Terdapat Satuan Kerja yang tidak menindaklanjuti surat persetujuan BMN yang telah diterbitkan;
2. Pengurusan Piutang Negara
 - Debitur tidak ditemukan atau tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutang;
 - barang jaminan tidak *marketable*;
3. Layanan Lelang
 - Khusus lelang hak tanggungan, tingkat produktivitas lelang masih rendah karena obyek lelang dijual dengan harga tinggi dan sepi peminat lelang;
 - Nomor kontak peserta lelang yang tidak ditunjuk menjadi pemenang lelang tidak tersimpan dalam aplikasi lelang, sehingga menyulitkan untuk komunikasi;
 - Pemohon lelang masih berkeinginan agar lelang dilaksanakan dengan cara konvensional;
4. Layanan Penilaian
 - Ketergunaan hasil penilaian terhadap tujuan penilaian (pemindahtanganan/pemanfaatan) Barang Milik Negara;
 - Beberapa objek yang dimohonkan penilaian masuk ke dalam kategori objek yang tidak dapat dinilai oleh Penilai Pemerintah KPKNL Tarakan;
5. Pengelolaan Sumber Daya
 - a. Sumber Daya Manusia
 - Jadwal pelaksanaan pelatihan tumpang tindih dengan penugasan pegawai;
 - b. Anggaran
 - Indikator Deviasi Hal. III Dipa, Penyerapan, dan Pengelolaan UP/TUP yang tidak maksimal;
 - c. Pengelolaan BMN dan pengadaan
 - Frekuensi perubahan anggaran yang cukup tinggi dan berpengaruh pada perubahan nilai pada paket pengadaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPKNL Tarakan

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara. Salah satu kondisi yang menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 adalah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia.

Berbagai upaya pencegahan penyebaran Novel Coronavirus telah dilakukan mengingat virus tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan manusia tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Sebagai respons atas hal tersebut, Pemerintah

telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lebih lanjut, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan, penyesuaian proses bisnis terkait lelang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan sekaligus melindungi pegawai dan stakeholders di masa pandemi melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Selain itu, penyesuaian proses bisnis terkait Piutang Negara juga dilakukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Selanjutnya, proses bisnis terkait pelayanan Penilaian juga dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Mengingat dampak pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan dirasakan selama beberapa tahun ke depan, Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Respons tersebut berupa strategi-strategi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dirumuskan untuk mencapai kondisi-kondisi yang diinginkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra ini. Strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain dari sisi arah kebijakan dan strategi, target pada indikator kinerja dalam Renstra ini juga mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target kinerja sehingga diperoleh proyeksi yang lebih realistis, mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam

perhitungan indikator menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu, "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontributif** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan di replikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional.
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya;

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
- b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
- c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal;
- b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh Kementerian/Lembaga;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara (Omnibus Law);
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas;

Adapun Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. *Cross function* unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah:

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *ecommerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *startup* di bidang *marketplace*.
- b. pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara.
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan ini adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
- d. Komunikasi publik yang efektif

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi;
- c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen aset dengan mewujudkan *IT-Based Service* Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DJKN melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, DJKN harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat Kantor Vertikal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

B. Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan

Dengan adanya penataan organisasi sebagai salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, diharapkan bahwa pencapaian target penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, setiap kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diinstruksikan untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (*output*)

maupun manfaat (*outcome*). Penetapan indikator dan target kinerja tersebut dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

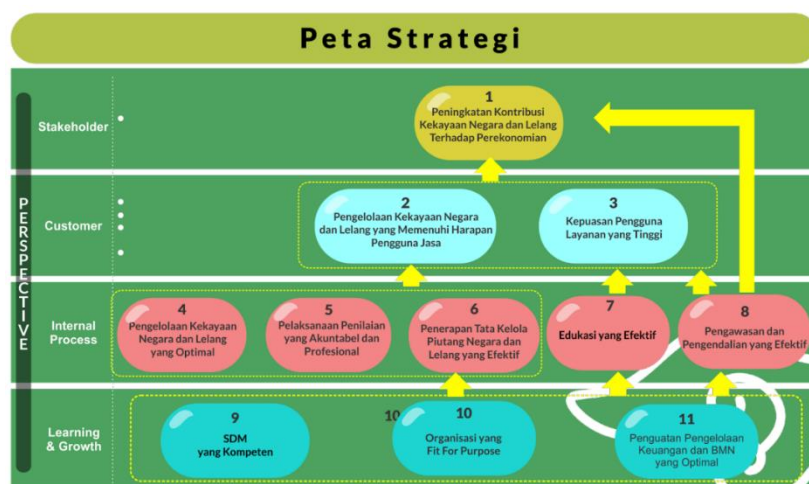
Perencanaan kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima dengan tetap menjaga integritas dan mempersembahkan kinerja terbaik di lingkungan instansi tersebut berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Tarakan mempunyai **visi dan misi** yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yang merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN yaitu, **”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”**

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KPKNL Tarakan menuangkan perencanaan kinerja tahun 2022 dalam sebuah Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Kepala KPKNL Tarakan sebagai berikut.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan, akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kpknl	4,5 (skala 5)
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (Bkpn)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja Bmn (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi	92 (skala 100)
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBBM	85 (skala 100)
		10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80 (skala 100)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN Dan Pengadaan	100%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	173.012.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	8.330.000
2. Pengelolaan Aset	164.682.000
Dukungan Manajemen	1.578.041.000
1. Legislasi dan Litigasi	19.220.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.543.931.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	7.170.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	7.720.000

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,5	4,5
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%

Kode SS/IKU	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	92	92	-	92	92	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	-	85%
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	-	80
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pada Kontrak Kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2022 terdapat addendum atas target dan/atau *trajectory* pada IKU: Raw Data Target Penurunan Outstanding Piutang Negara pada Triwulan III

Kode IKU	Nama IKU	Target Semula	Target Ditetapkan
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp114.000.000	Rp605.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2022 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tarakan mencapai 115,31% dan masuk kategori hijau, di mana dari 20 (dua puluh) IKU terdapat 1 (satu) IKU yang masuk kategori kuning dengan rincian sebagai berikut:

K-WIDE	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	21,56%	71,82%	71,82%	105,55%	105,55%	148,47%	148,47%	
Capaian Kontrak Awal	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	55,07%	48,43%	48,43%	55,04%	55,04%	55,60%	55,60%	
Capaian Kontrak Awal	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	31,88%	71,17%	71,17%	111,04%	111,04%	158,10%	158,10%	
Capaian Kontrak Awal	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum				Adendum Raw Target				
Realisasi	46,92%	377,85%	377,85%	187,89%	187,89%	223,78%	223,78%	
Capaian Kontrak Awal	120,00%	120,00%	120,00%					
Capaian Kontrak Adendum				120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

K-WIDE	3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	-	-	-	-	-	4,50	4,50	

Target setelah Adendum								Maximize / TLK
Realisasi						4,80	4,80	
Capaian Kontrak Awal						106,67%	106,67%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi		82,20%	82,20%	82,20%	79,51%	78,55%	78,55%	
Capaian Kontrak Awal		120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	20,00%	60,00%	60,00%	100%	100%	200%	200%	
Capaian Kontrak Awal	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	0,00%	55,56%	55,56%	100,00%	100,00%	122,22%	122,22%	
Capaian Kontrak Awal	0,00%	111,11%	111,11%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	7,99%	54,73%	54,73%	80,42%	80,42%	100,00%	100,00%	
Capaian Kontrak Awal	79,88%	120,00%	120,00%	107,23%	107,23%	100,00%	100,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	Minimize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian Kontrak Awal	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							Pol/KP
	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	
Target sebelum Adendum	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian Kontrak Awal	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							Pol/KP
	6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	
Target sebelum Adendum	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	Minimize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian Kontrak Awal	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	7. Edukasi yang Efektif							Pol/KP
	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	
Target sebelum Adendum	-	92	92	-	92	92	92	Maximize / Average
Target setelah Adendum								
Realisasi		95,13	95,13		95,13	96,01	95,57	
Capaian Kontrak Awal		103,40%	103,40%		103,40%	103,88%	103,88%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							Pol/KP
	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	
Target sebelum Adendum	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi		72,97%	72,97%		89,19%	91,89%	91,89%	
Capaian Kontrak Awal		120,00%	120,00%		120,00%	108,11%	108,11%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	9. SDM yang Kompeten							Pol/KP
	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	
Target sebelum Adendum	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	15,00%	60,00%	60,00%	112,00%	112,00%	120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Awal	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	10. Organisasi yang fit-for-purpose							
	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	-	-	-	-	-	85	85	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi						97,83	97,83	
Capaian Kontrak Awal						115,09%	115,09%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	10. Organisasi yang fit-for-purpose							
	10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	-	-	-	-	-	80	80	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi						96,42	96,42	
Capaian Kontrak Awal						120%	120%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	10. Organisasi yang fit-for-purpose							
	10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	90	90	90	90	90	90	90	Maximize / Average
Target setelah Adendum								
Realisasi	96,33	96,57	96,45	98,65	97,18	98,97	97,63	
Capaian Kontrak Awal	107,03%	107,17%	107,17%	107,98%	107,98%	108,48%	108,48%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi	97,77%	97,87%	97,87%	97,74%	97,74%	94,40%	94,40%	
Capaian Kontrak Awal	102,38%	102,48%	102,48%	102,35%	102,35%	98,85%	98,85%	
Capaian Kontrak Adendum								

K-WIDE	11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
	11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target sebelum Adendum	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Maximize / TLK
Target setelah Adendum								
Realisasi						160,97%	160,97%	
Capaian Kontrak Awal						120,00%	120,00%	
Capaian Kontrak Adendum								

Untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2022, 1 (satu) IKU yang kategori kuning yaitu Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Penyerapan Anggaran

Capaian penyerapan anggaran di Triwulan I dan II tidak maksimal karena banyak kegiatan yang belum terealisasi;

b. RPD

Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran anggaran dari KPKNL Tarakan ke KPKNL Bontang; dan

c. Efisiensi Anggaran

Apabila nilai realisasi anggaran disandingkan dengan capaian output tidak optimal efisiensinya, hal ini dikarenakan adanya pengeluaran diluar rencana penarikan dana.

1. Membandingkan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Periode Sebelumnya

a. Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu Sampai Dengan Lima Tahun Terakhir

Meskipun terdapat IKU yang sama di setiap tahunnya, namun secara target, perhitungan, sasaran strategis, dan perspektif dapat berbeda untuk IKU yang sama. Namun apabila dibandingkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tarakan, pada tahun 2018 diperoleh NKO sebesar 113,03%, tahun 2019 sebesar 112,40%, tahun 2020 sebesar 107,77%, tahun 2021 sebesar 113,13%, dan tahun 2022 sebesar 115,31%, dapat disampaikan tabel perbandingan (dalam persentase pencapaian target) sebagai berikut:

K-WIDE	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian										KET
	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	100%	2.828.0 28.132	100,0 %	11.797. 645.324	100,0 0%	11.652.23 3.369	100,0 %	8.940.0 00.000	100%	7.362.0 00.000	Terdapat perbedaan target dan perhitungan antara tahun 2018 dan tahun 2019 dengan tahun 2020 dan 2021, juga tahun 2022
Target Adendum						9.486.000 .000					
Realisasi	140,2 5%	3.485.0 86.150	1660,8 9%	327.861 .232.60 7	101,6 3%	9.640.343 .363	141,5 4%	12.653. 982.72 3	148,47 %	10.930. 549.21 4	
Capaian	120,00%		120,00%		101,63%		120,00%		120,00%		

K-WIDE	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian										KET
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	30,00 %		32,0%		34,00 %		35,00 %		36,00%		1. Terdapat perbedaan target dan perhitungan. 2. Terdapat pelaksanaan kedai lelang UMKM pada tahun 2021 dan tahun 2022 sehingga frekuensi lelang sukarela tahun 2021 dan tahun 2022 lebih banyak dari tahun 2020
Realisasi	44,44 %		37,30 %		58,40 %		52,31 %		55,60%		
Capaian	120,0 0%		116,57 %		120,0 0%		120,0 0%		120,00 %		

											dan sebelumnya. Sehingga mempengaruhi persentase capaian.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

K-WIDE	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa										KET
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	100,00%	15.000.000.000	100,00%	66.229.000.000	100,00%	79.329.000.000	100,00%	92.000.000.000	100,00%	91.000.000.000	Terdapat perbedaan target raw yang cukup besar antara tahun 2020 dengan tahun 2019 dan tahun 2021. Terdapat pengurangan wilayah kerja pada tahun 2022, sehingga sangat mempengaruhi target dan capaian pada tahun 2022.
Realisasi	58,15%	8.722.050.670	111,34%	73.741.222.771	88,99%	70.592.700.855	177,44%	163.246.548.158	158,10%	143.870.208.666	
Capaian	58,15%		111,34%		88,99%		120,00%		120,00%		

K-WIDE	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa										KET
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target					5,0%	1.022.946.365	100,00%	1.000.000.000	100,00%	114.000.000	Nilai Outstanding PN tahun 2020 adalah berkas (saldo PND) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sedangkan nilai Outstanding PN tahun 2021 adalah berkas (saldo PND) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
Target Adendum										605.000.000	
Realisasi					6,23%	63.691.267	181,00%	1.806.550.615	223,78%	1.353.848.344	
Capaian					120,00%		120,00%		120,00%		

K-WIDE	3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi										KET
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	4,30		4,37		4,40		4,45		4,50		
Realisasi	4,85		4,77		4,90		4,75		4,80		
Capaian	112,79%		109,15%		111,36%		106,74%		106,67%		

K-WIDE	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal										KET
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target					100,00%	183	62,00%		65,00%		Terdapat perbedaan target dan perhitungan antara tahun 2020 dengan tahun 2021
Target Adendum						141					
Realisasi					100,00%	141	89,43%		78,55%		
Capaian					100,00%		120,00%		120,00%		

											dan tahun 2022.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

K-WIDE	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal										KET
	4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	100,0 %	20	100,0 %	43	100,0 %	177	100,0 %	178	100,0%	10	
Target Adendum						131					
Realisasi	140,0 0%	28	104,65 %	45	100,0 %	131	100,0 %	178	200,0%	20	
Capaian	120,00%		104,65%		100,00%		100,00%		120,00%		

K-WIDE	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal										KET
	4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target					100,0 %	7	100,0 %	37	100,0%	18	
Realisasi					157,1 4%	11	110,8 1%	41	122,22 %	22	
Capaian					120,00%		110,81%		120,00%		

K-WIDE	4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal										KET
	4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target					100,0 %	92	100,0 %	27	100,0%	219	
Realisasi					100,0 %	92	100,0 %	27	100,0%	219	
Capaian					100,0%		100,0%		100,0%		

K-WIDE	5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional										KET
	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target					30,00 %		22,00 %		19,00%		
Realisasi					0,08 %		0,00 %		0,00%		
Capaian					120,0 0%		120,0 0%		120,00 %		

K-WIDE	6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif										KET
	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	85,0 %		90,0%		90,0 %		92,0 %		92,0%		
Realisasi	85,62 %		100,00 %		100,0 0%		100,0 0%		100,00 %		
Capaian	100,7 3%		111,11 %		111,1 1%		108,7 0%		108,70 %		

K-WIDE	6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif										KET
	6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target							12,5 %		10,0%		
Realisasi							0,00 %		0,00%		
Capaian							120,0 0%		120,00 %		

K-WIDE	7. Edukasi yang Efektif										KET
	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	86		88		90		91		92		
Realisasi	94,51		91,92		93,96		93,86		95,57		
Capaian	109,9 0%		104,45 %		104,3 9%		103,1 4%		103,88 %		

K-WIDE	8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif										KET
	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	50,0 %		70,0%		80,0 %		85,0 %		85,0%		Terdapat perbedaan target dan perhitungan antara tahun 2018-2019 (tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN) dengan tahun 2020 - 2022.
Realisasi	64,0 %		70,0%		90,91 %		95,24 %		91,89%		
Capaian	120,0 0%		100,00 %		113,6 4%		112,0 4%		108,11 %		

K-WIDE	9. SDM yang Kompeten										KET
	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	90,0 %		87,0%		100,0 %		100,0 %		100,0%		Terdapat perbedaan perhitungan pada tahun 2018 dimana nama IKU yakni Persentase Pemenuhan Standar Hard Competency
Realisasi	91,00 %		95,46 %		120,0 0%		120,0 0%		120,00 %		
Capaian	100,5 6%		109,72 %		120,0 0%		120,0 0%		120,00 %		

K-WIDE	10. Organisasi yang fit-for-purpose										KET
	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target			75						85		Tahun 2019 memperoleh predikat WBK. Tahun 2022 memperoleh predikat WBBM.
Realisasi			97						97,83		
Capaian			120,00 %						115,09 %		

K-WIDE	10. Organisasi yang fit-for-purpose										KET
	10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	70		85		70		75		80		Penilaian hasil review pengelolaan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 sudah berbasis BSC.
Realisasi	84,00		93,14		74,52		92,95		96,42		
Capaian	120,0 0%		109,58 %		106,4 6%		120,0 0%		120,00 %		

K-WIDE	10. Organisasi yang fit-for-purpose										KET
	10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target					80		80		90		Tahun 2020 nama IKU nya adalah Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai sehingga terdapat perbedaan
Realisasi					95,29		95,25		97,63		
Capaian					119,1 1%		119,0 6%		108,48 %		

										materi dan perhitungan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

K-WIDE	11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal										KET
	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target	95,0 %		95,0%		95,0 %		95,5 %		95,5%		
Realisasi	98,09 %		95,74 %		96,02 %		94,14 %		94,40%		
Capaian	103,2 5%		100,78 %		101,0 7%		98,58 %		98,85%		

K-WIDE	11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal										KET
	11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan										
T/R	2018		2019		2020		2021		2022		
Target			100,0 %						100,00 %		
Realisasi			100,0 %						160,97 %		
Capaian			100,00 %						120,00 %		

b. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Apabila dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) maka dapat disampaikan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target dalam RPJM (2020-2024)
		2020	2021	2022	
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara					
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%	89,43%	78,55%	57%
	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	9.640 Miliar	12.653 Miliar	148,47%	100%
	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	63 Juta (6,23%)	1.806 Miliar (180,66%)	223,78%	Tidak ada target dalam RPJM
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	131 (100%)	178 (100%)		100%
	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	92 (100%)	27 (100%)	100%	Tidak ada target dalam RPJM
	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	0,08%	0,00%	0,00%	29%

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	11 BKPN (157,14%)	41 BKPN (110,81%)	122,22%	100%
	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	0%	0%	Tidak ada target dalam RPJM
Peningkatan Pelayanan Lelang					
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase realisasi pokok lelang	70.592 Miliar (88,99%)	163.246 Miliar (177,44%)	158,10%	100%
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase produktivitas lelang	73 Lelang Laku dari 125 Lelang (58,40%)	73 Lelang Laku dari 135 Lelang (52,31%)	55,60%	34%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	100%	100%	100%	Tidak ada target dalam RPJM
Kesinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Governance, dan Penguatan Kelembagaan					
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	98,66	98,81	-	Tidak ada target dalam RPJM
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,9 (skala 5)	4,75 (skala 5)	4,8 (skala 5)	4,05 (skala 5)
Edukasi yang efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93,96	93,86	95,57	Tidak ada target dalam RPJM
Kesinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Governance, dan Penguatan Kelembagaan					
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	90,91%	95,24%	-	75%
SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120%	120%	120%	Tidak ada target dalam RPJM
Organisasi yang fit for purpose	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	74,52	92,95	-	Tidak ada target dalam RPJM

	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	95,25	97,63%	Tidak ada target dalam RPJM
Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	96,02%	94,14%	94,40%	95%

2. Upaya-upaya effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Tarakan melakukan beberapa upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2022, yaitu:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian		
Kode	IKU	Upaya <i>Extra Effort</i> yang Dilakukan
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Selalu menjalin hubungan baik dengan segenap <i>stakeholder</i> dan mencari solusi bersama untuk setiap permasalahan
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Selalu menjalin hubungan baik dengan segenap <i>stakeholder</i> dan mencari solusi bersama untuk setiap permasalahan
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan program Keringanan Utang 2022 - Penyampaian surat paksa
Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi		
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku - Melakukan Pengurusan Piutang Negara sesuai SOP, membuka ruang konsultasi Pengurusan Piutang Negara, melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada semua stake holder - Melakukan Penilaian sesuai dengan SOP dan Berkoordinasi dengan Satker Pengguna Jasa mengenai jadwal pelaksanaan survei lapangan
Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal		
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data BMN
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	Berkoordinasi secara berkelanjutan dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan terkait, guna <i>update</i> informasi terkait kendala maupun progress sertifikasi
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan program Keringanan Utang 2022 - Penyampaian surat paksa
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Melakukan penggalian data pendukung untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja BMN yang sesuai dengan kondisi riil

Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJKN Kaltimara terkait bantuan teknis dan tenaga penilai
Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	Memberikan edukasi kepada pemohon lelang tentang sisi positif lelang e-auction
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	Rekonsiliasi data PNBPN antara OMSPAN dengan FocusPN
Sasaran Starategis 7: Edukasi yang Efektif		
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan segenap stakeholder terkait - Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Penyerah Piutang Negara - Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Satuan Kerja
Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	Komunikasi secara berkala dengan satuan kerja sebagai pengingat untuk segera menindaklanjuti
Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten		
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Menyampaikan reminder secara rutin agar pegawai mengajukan usulan pelatihan setiap bulan
Sasaran Strategis 10: Organisasi yang fit-for-purpose		
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pegawai KPKNL Tarakan dan mendokumentasikan seluruh dokumen setiap komponen pengungkit
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pegawai terkait proses pengelolaan kinerja
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Memastikan FGD Pejabat Administrator dilaksanakan seawal mungkin
Sasaran Strategis 11: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal		
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Prognosa Anggaran - Menyusun Simulasi Perhitungan IKU IKPA dan SMART DJA - Melakukan optimalisasi anggaran - Melakukan penyesuaian RPD - Melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran - Menyediakan alat bantu monitoring pelaksanaan anggaran yang up to date bagi seluruh pejabat pengelola keuangan dan para pemegang peran manajerial
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	- Memastikan semua aset telah ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

		- Berkoordinasi dengan PPK, Pejabat Pengadaan dan Staf PPK dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
--	--	---

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan KPKNL Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak terlepas dari strategi maupun langkah langkah yang telah direncanakan oleh masing-masing seksi. Berikut analisis keberhasilan maupun alternatif solusi yang telah dilakukan KPKNL Tarakan:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			
Kode SS/IKU	IKU	Analisis Penyebab Keberhasilan Kerja Tahun 2022	Alternatif Solusi yang telah dilakukan
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Daya beli masyarakat yang mulai meningkat, dan koordinasi yang baik antara KPKNL dengan <i>stakeholder</i>	-
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang		-
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Daya beli masyarakat yang mulai meningkat, dan koordinasi yang baik antara KPKNL dengan <i>stakeholder</i>	-
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Koordinasi yang baik dengan Kanwil dan Penyerah Piutang, penyampaian Surat Paksa dan menerbitkan PSBDT	Koordinasi dengan Penyerah Piutang, Penyampaian Crash Program Keringanan Hutang
Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL, satuan kerja, dan pihak-pihak terkait - Koordinasi yang baik antara KPKNL dengan Penyerah Piutang Negara - Stakeholder puas dengan layanan KPKNL - Melakukan koordinasi yang baik kepada pengguna jasa 	Melakukan bimtek/ sosialisasi/ <i>knowledge sharing</i> kepada satuan kerja terkait pengelolaan kekayaan negara
Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL, Satuan Kerja, dan	Melakukan bimtek dan pengukuran langsung terhadap

		Kanwil DJKN Kaltimara, serta pihak lain yang terkait	objek pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL Tarakan, Kantor Pertanahan, Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait	Melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait, untuk proses percepatan sertipikasi.
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Koordinasi yang baik dengan Kanwil dan Penyerah Piutang, penyampaian Surat Paksa dan menerbitkan PSBDT	Koordinasi dengan Penyerah Piutang, Penyampaian Crash Program Keringanan Hutang
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL dan Satuan Kerja, serta pihak lain yang terlibat	Koordinasi dengan Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait
Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	Analisis atas permohonan dan kegunaan hasil penilaian yang dilakukan dengan baik	Melakukan identifikasi kewenangan atas objek yang dimohonkan
Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	Pemohon lelang memahami dampak positif lelang e-auction	Sosialisasi berkala kepada para <i>stakeholder</i> pemohon lelang
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	Akurasi data pencatatan/penyetoran PNBPN yang baik	Rekonsiliasi berkala atas data PNBPN antara OMSPAN dengan FocusPN
Sasaran Starategis 7: Edukasi yang Efektif			
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	- Kualitas SDM penyaji dan juga bahan sosialisasi yang baik - Hubungan baik dengan segenap <i>stakeholder</i> terkait	Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Satuan Kerja, Penyerah Piutang Negara, serta pihak lain yang terlibat
Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL dan satuan kerja	Mendorong satuan kerja untuk segera menindaklanjuti surat persetujuan yang telah terbit
Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten			
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Banyak pelaksanaan diklat yang bisa diselesaikan oleh pegawai	-
Sasaran Strategis 10: Organisasi yang fit-for-purpose			
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	Kerjasama dan koordinasi yang baik antar pegawai KPKNL Tarakan	-
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	Melakukan koordinasi terkait pengelolaan kinerja khususnya

			yang masuk dalam penilaian revidi
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	FGD Pejabat Administrator selalu dilaksanakan tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
Sasaran Strategis 11: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal			
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Penyerapan Anggaran yang tidak mencapai target pada Triwulan kedua disebabkan adanya pergeseran wilayah kerja sedangkan perhitungan indikator penyerapan anggaran bersifat rollover sehingga menyebabkan nilai sampai Triwulan IV tidak maksimal - Adanya keterlambatan dalam penetapan revisi anggaran kewenangan DJA dikarenakan pergeseran wilayah menyebabkan besaran RPD aplikasi SPAN pada Triwulan III masih belum termutakhirkan menyebabkan Nilai Deviasi melebihi batas 5% - Pengajuan GUP yang kurang proporsional antaran besaran GUP dengan jangkawaktu pengajuan - Kurangnya Optimalisasi Anggaran pada RO yang capaiannya tidak dapat melebihi 100% karena adanya beberapa 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemutakhiran RPD Bulanan - Melaksanakan pemutakhiran revisi anggaran
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	- Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat	- Melakukan pemutakhiran data paket pengadaan pada aplikasi SiRUP secara berkala segera setelah revisi anggaran disahkan

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi. Efisiensi terdiri atas efisiensi output program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I dan efisiensi RO untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja.

Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi output program dan efisiensi RO antara lain capaian output program, capaian RO, pagu dalam DIPA terakhir, dan realisasi anggaran.

Data efisiensi pada KPKNL Tarakan untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No	Rincian Output	Target Volume RO	Satuan	Realisasi Volume RO	CRO	(CRO x Pagu)- Realisasi
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	50	Orang	170	3,40	6.420.600,00
2	Sosialisasi Pengelolaan Lelang	80	Orang	424	5,30	24.711.700,00
3	Sosialisasi Pengelolaan PN	45	Surat Persetujuan/Penolakan	112	2,49	60.020.888,89
4	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara (Utilisasi)	18	BKPN	22	1,22	15.108.000,00
5	Keputusan Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	100	Risalah Lelang	217	2,17	15.791.400,00
6	Risalah Lelang	10	Risalah Lelang	17	1,70	6.567.200,00
7	Risalah Lelang Sukarela UMKM	14	Rekomendasi	20	1,43	2.442.857,14
8	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	50	Rekomendasi	219	4,38	68.320.120,00
9	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	151	Rekomendasi	154	1,02	6.217.307,95
10	Rekomendasi Hasil Kajian Tk. Kesesuaian Penggunaan BMN dgn SBSK	1	Rekomendasi	1	1,00	1.871.000,00
11	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara (Wasdal)	1	Rekomendasi	2	2,00	15.192.000,00
14	Rekomendasi Hasil Penilaian (Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian)	1	Perkara	1	1,00	140.000,00
15	Layanan Bantuan Hukum	12	Bulan Layanan	12	1,00	8.304.500,00
16	Kerumahtanggaan	12	Bulan Layanan	12	1,00	87.165.806,00
17	Layanan Perkantoran	7	Unit	7	1,00	109.000,00
20	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	50	Orang	75	1,50	2.180.000,00
21	Pembinaan/Edukasi Publik	4	Kegiatan	5	1,25	3.899.500,00
23	Kehumasan	5	Rekomendasi	7	1,40	3.892.000,00
CRO					190,33%	328.353.879,98
Efisiensi						18,82%

Dengan menggunakan metode perhitungan sesuai sesuai PMK 22/PMK.02/2021 dan ND-6/MK.1/2021 diperoleh nilai efisiensi KPKNL Tarakan sebesar **18,82%**. Sebagaimana data pada tabel di atas, efisiensi pada KPKNL Tarakan diperoleh dari efisiensi penggunaan anggaran dan/atau optimalisasi capaian output yang melebihi target yang ditetapkan dalam DIPA terutama pada beberapa output non generik.

Selama tahun 2022 yang merupakan masa peralihan menuju New Normal, KPKNL Tarakan mengoptimalkan media daring dan non tatap muka lainnya dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Hal tersebut terbukti dapat menekan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian output pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mendorong timbulnya efisiensi pelaksanaan anggaran.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

KPKNL Tarakan memiliki beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2022 untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian		
Kode	IKU	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan pemohon lelang untuk setiap lelang yang akan diajukan - Edukasi kepada pemohon lelang supaya memasarkan obyek lelang dengan maksimal
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan pemohon lelang untuk setiap lelang yang akan diajukan - Edukasi kepada pemohon lelang supaya memasarkan obyek lelang dengan maksimal
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Penyampaian Surat Paksa, Penyampaian <i>Crash Program</i> Keringanan Hutang, pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara
Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi		
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi setiap layanan dan membina hubungan baik dengan segenap stakeholder - Melakukan kendali mutu atas laporan penilaian dengan cara melaksanakan pemaparan konsep laporan penilaian
Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal		
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Membuat dan membagikan form pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan dokumen pendukung, dan melakukan perhitungan SBSK
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipatkan	Melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Penyampaian Surat Paksa, Penyampaian <i>Crash Program</i> Keringanan Hutang, pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara

4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Membuat dan membagikan form pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan data pendukung, dan menginput data pada SIMAN Portofolio
Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-
Sasaran Strategis 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	Edukasi kepada pemohon lelang
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	- Rekonsiliasi data PNBPN Lelang PL I dan Pegadaian - Rekonsiliasi data PNBPN antara OMSPAN dengan FocusPN
Sasaran Starategis 7: Edukasi yang Efektif		
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	- Koordinasi dan terjalinnya hubungan baik dengan stakeholder terkait - Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Penyerah Piutang Negara melalui zoom, kunjungan kerja, maupun pelaksanaan sosialisasi - Melakukan sosialisasi secara daring dan luring dengan Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPKNL Tarakan
Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-
Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten		
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Dilakukan monitoring capaian kinerja setiap bulan
Sasaran Strategis 10: Organisasi yang fit-for-purpose		
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	Dilakukan monitoring secara rutin
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	Menyampaikan laporan dan atau mengadakan sosialisasi/rapat rutin dengan tepat waktu
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-
Sasaran Strategis 11: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal		
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	- Monitoring Rencana Penarikan Dana - Monitoring Realisasi Anggaran - Monitoring Capaian Output - Simulasi Pehitungan Nilai IKPA dan Smart DJA
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	- Monitoring progres realisasi pengelolaan BMN dan pengadaan - Workshop dan sosialisasi yang diadakan secara berkala oleh Kantor Pusat

6. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko

Risiko yang akan dimitigasi beserta tindak lanjut penanganannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk risiko satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah koordinasi dengan satuan kerja terkait tindak lanjut persetujuan yang telah diterbitkan pada satuan kerja. Setelah dilakukan koordinasi dengan beberapa satuan kerja, persetujuan pengelolaan BMN telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja sebanyak 34 dari total 37 persetujuan yang diterbitkan;
- b. Untuk risiko objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang, Pelayanan Lelang telah koordinasi dengan pemohon dan mencantumkan dalam penetapan jadwal lelang agar pemohon dapat mengosongkan objek lelang sehingga tidak ada objek lelang yang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang;
- c. Untuk risiko satuan kerja tidak menyampaikan laporan wasdal tepat waktu, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah menyampaikan himbuan penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian dan koordinasi berkelanjutan dengan satuan kerja terkait penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian;
- d. Untuk risiko penarikan dana tidak sesuai dengan rencana, Subbagian Umum telah menyampaikan target penyerapan anggaran dan capaian output tiap triwulan serta himbuan penyesuaian RPD dan kendala pencapaian output pada Kewenangan masing-masing seksi dan subbagian sebagai *Unit In Charge* (UIC), dan melakukan Revisi Anggaran dan penyesuaian RPD Hal. III DIPA;
- e. Untuk risiko banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih, Seksi Piutang Negara telah melakukan penagihan Piutang Negara dan menyelesaikan BKPN dengan 4 cara yaitu pelunasan, PSBDT, pengembalian, atau penarikan.

7. Rencana Aksi ke Depan

Rencana aksi KPKNL Tarakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan		
Kode	IKU	Rencana Aksi Ke Depan
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	<ul style="list-style-type: none">- Membuat data base terkait pemohon lelang yang belum aktif melaksanakan lelang untuk kemudian melakukan koordinasi dan menawarkan bantuan apabila ada kesulitan dalam permohonan lelang- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja untuk tindak lanjut persetujuan yang sudah diterbitkan
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	<ul style="list-style-type: none">- Membuat data base terkait pemohon lelang yang belum aktif melaksanakan lelang untuk kemudian melakukan

		koordinasi dan menawarkan bantuan apabila ada kesulitan dalam permohonan lelang
Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	- Membuat data base terkait pemohon lelang yang belum aktif melaksanakan lelang untuk kemudian melakukan koordinasi dan menawarkan bantuan apabila ada kesulitan dalam permohonan lelang
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	- Melakukan Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka pengurusan piutang, penagihan debitur, PSBDT
Sasaran Strategis 3: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal		
3a-CP	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja untuk tindak lanjut persetujuan yang sudah diterbitkan
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	- Melakukan Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka pengurusan piutang, penagihan debitur, PSBDT
Sasaran Strategis 4: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	- Melakukan Koordinasi dengan Seksi PKN secara berkala
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	- Melakukan pelayanan di bidang penilaian sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku
Sasaran Strategis 5: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	- Membuat data base terkait pemohon lelang yang belum aktif melaksanakan lelang untuk kemudian melakukan koordinasi dan menawarkan bantuan apabila ada kesulitan dalam permohonan lelang, dan menganjurkan supaya pemohon lelang memilih jenis lelang E-Auction.
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	- Membuat data base terkait pemohon lelang yang belum aktif melaksanakan lelang untuk kemudian melakukan koordinasi dan menawarkan bantuan apabila ada kesulitan dalam permohonan lelang
5c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	- Melakukan pemutakhiran data secara rutin buku register lelang - Monitoring aplikasi OMSPAN, SIMPONI, dan FocusPN - Melaksanakan rekonsiliasi data PNBPN Lelang PL I dan Pegadaian secara berkala - Pencatatan dan penyetoran PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku - Rekonsiliasi data PNBPN tepat waktu
Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif		
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	- Koordinasi dengan Satuan Kerja untuk segera melakukan tindak lanjut atas surat persetujuan yang telah diterbitkan

Sasaran Strategis 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif		
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan atas permohonan informasi publik yang disampaikan ke KPKNL Tarakan - Menyampaikan laporan PPID Tingkat III tepat waktu - Menyampaikan penunjukan petugas layanan informasi publik pada PPID Tingkat III tepat waktu
Sasaran Strategis 8: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal		
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, dan proyeksi optimalisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi - Melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran - Menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan target capaian anggaran dan capaian output
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran data BMN pada aplikasi SIMAN secara berkala - Monitoring progres realisasi pengelolaan BMN dan pengadaan - Input realisasi pengadaan secara berkala
8c-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana secara Berkala - Pemantauan kesesuaian realisasi anggaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana
Sasaran Strategis 9: Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif		
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa seluruh proses bisnis/ layanan yang diberikan oleh setiap pegawai didasari dengan integritas dan nilai juga budaya kemenkeu
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai
Sasaran Strategis 10: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi		
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif
10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyusunan IDP Pegawai tahun 2023 untuk memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program tahun 2022, dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran KPKNL Tarakan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan KPKNL TARAkan

No.	Uraian	2022		
		Target	Realisasi	%
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	7.362.000.000	10.930.549.214	148,47%

2. Belanja KPKNL TARAkan

No.	Uraian	2022		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	-	-	0,00%
2	Belanja Barang	1.745.010.000	1.612.464.194	92.40
3	Belanja Modal	-	-	-
	Jumlah belanja	1.745.010.000	1.612.464.194	92.40

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan pada BAB III bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja KPKNL Tarakan secara umum pada Tahun Anggaran 2022 adalah sangat baik. Semua target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan sangat baik, kecuali IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2022 tercapai sebesar 115,31%.

B. LANGKAH DI MASA MENDATANG

Capaian kinerja dan prestasi KPKNL Tarakan yang sangat memuaskan harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang. KPKNL Tarakan senantiasa akan meningkatkan kinerja di tahun 2022 dengan cara sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Melakukan pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait pengukuran SBSK, perencanaan, dan optimalisasi BMN;
- Terhadap bidang tanah yang menjadi target sertifikasi, maka melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan satuan kerja dan kantor pertanahan, serta pihak lain yang terkait;
- Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat PKKN, Kanwil DJKN Kaltimara, dan satuan kerja terkait;
- Melakukan koordinasi berkelanjutan serta pembinaan terkait pengelolaan BMN;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja untuk segera melakukan tindak lanjut atas surat persetujuan yang telah diterbitkan;

2. Pengurusan Piutang Negara

- Penagihan rutin, lelang barang jaminan, PSBDT;
- Melakukan Pengurusan Piutang Negara sesuai SOP, membuka ruang konsultasi Pengurusan Piutang Negara, melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara;
- Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Penyerah Piutang Negara;

3. Layanan Lelang

- Meningkatkan penggalian potensi lelang ke stakeholder terkait;
- Meningkatkan koordinasi dan tetap menjaga hubungan baik dengan stakeholder;
- Membuat data base terkait pemohon lelang yang belum aktif melaksanakan lelang untuk kemudian melakukan koordinasi dan menawarkan bantuan apabila ada kesulitan dalam permohonan lelang;

4. Layanan Penilaian

- Terus melakukan pelayanan di bidang penilaian dan berkoordinasi dengan baik kepada pengguna jasa;
- Melakukan koordinasi dengan Seksi PKN secara berkala
- Melakukan pelayanan di bidang penilaian sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku;

5. Pengelolaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

- Mengajukan usulan pelatihan setiap bulan;
- Meningkatkan kerjasama dengan seluruh pegawai dalam kegiatan pengelolaan kinerja, dan mendokumentasikan dokumen atau laporan pengelolaan kinerja dengan baik, serta melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai ketentuan dan pada waktunya;
- Konsisten dengan pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dijadwalkan pada kesempatan pertama;
- Melakukan penyusunan IDP Pegawai tahun 2023 untuk memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai;

b. Anggaran

- Melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, dan proyeksi optimalisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- Melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran;
- Menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan target capaian anggaran dan capaian output;
- Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana secara Berkala;
- Pemantauan kesesuaian realisasi anggaran berdasarkan Rencana Penarikan Dana;

c. Pengelolaan BMN dan pengadaan

- Pemutakhiran data BMN pada aplikasi SIMAN secara berkala;
- Monitoring progres realisasi pengelolaan BMN dan pengadaan;
- Input realisasi pengadaan secara berkala.

